

Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat

The Role of Subnational Government in the Implementation of Pre-employment Card Program in West Java Province

Elga Andina

elga.andina@dpr.go.id

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Received: March 21, 2022 | Revised: May 17, 2022 | Published: June 30, 2022

Abstract: *The Pre-employment Card Program is a responsive policy due to the difficulty of getting a job, especially during the pandemic. Subnational governments are expected to play roles in (1) socialization; (2) provision of data on training institutions; (3) provision of data on manpower needed in the region; and (4) facilitation of participant registration. This study conducted a formative evaluation to find out the role of the subnational government in supporting the implementation of the Pre-employment Card Program in West Java Province who holds the highest number of the Pre-employment Card Program beneficiary in Indonesia. The data were obtained from interviews with officers of the Manpower and Transmigration Office of West Java Province, the Bandung City Manpower Office, the Social Service of West Java Province, labor union, and the Indonesian Employers' Association of West Java Province. Using the narrative analysis technique, it can be concluded that the role of subnational government in the Pre-employment Card Program is minimal, which only acts as spectators. Of the four mandated roles, the West Java subnational government can only socialize and provide facilitation services for registration and selection of types of training. Therefore, Commission IX needs to encourage the central government to provide access and space for the subnational government to carry out its roles in order to increase the effectiveness of the implementation of the Pre-employment Card Program. There's also a need to encourage the subnational government to stimulate the labor market in its region to absorb graduates of the Pre-employment Card Program training.*

Keywords: *Pre-employment Card Program; subnational government*

Abstrak: Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan responsif atas kekhawatiran sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama di masa pandemi. Pemda diharapkan berperan dalam (1) sosialisasi; (2) penyediaan data lembaga pelatihan; (3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja di daerahnya; dan (4) fasilitasi pendaftaran peserta. Penelitian ini melakukan evaluasi formatif untuk mengetahui bagaimana peran pemda dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah penerima Program Kartu Prakerja tertinggi di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dengan teknik analisis naratif, dapat disimpulkan minimnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam Program Kartu Prakerja yang hanya bertindak sebagai penonton. Dari empat peran yang diamanatkan, pemda Jawa Barat baru dapat melakukan sosialisasi dan memberikan layanan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan. Oleh karena itu, Komisi IX perlu mendorong pemerintah pusat untuk memberikan akses dan ruang bagi pemda untuk melaksanakan perannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi Program Kartu Prakerja. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong pemda menggeliatkan pasar tenaga kerja di daerahnya untuk menyerap lulusan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Kata Kunci: pemerintah daerah; Program Kartu Prakerja

Pendahuluan

Pandemi telah menyebabkan perubahan ekstrem dalam pasar kerja Indonesia. Banyak perusahaan terpaksa menutup usahanya dan memutus hubungan kerja dengan karyawannya. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 27 Mei 2020 memperlihatkan sebanyak 3.066.567 pekerja telah terdampak diputus hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan selama pandemi (Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, 2020). Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, yang sudah jelas diketahui nama dan alamatnya, pekerja sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.058.284 pekerja dan pekerja sektor formal yang ter-PHK 380.221 pekerja, sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak 318.959 pekerja. Selain itu, terdapat 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan serta 465 pemagang yang dipulangkan (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara, 2020).

PHK di masa pandemi meningkatkan kerawanan kemiskinan karena kehilangan penghasilan. Gelombang PHK yang serentak di awal pandemi makin dipersulit dengan terbatasnya lapangan kerja. Sebagai bentuk upaya melindungi warga negaranya, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menjaga kelangsungan hidup pekerja yang kehilangan pekerjaan, antara lain dengan dukungan finansial baik berupa bantuan subsidi upah (BSU) maupun bantuan tunai, pemberian pelatihan bahkan dengan mengoptimalkan balai latihan kerja (BLK), insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas, program padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja terdampak, serta jaring pengaman sosial.

Salah satu program baru yang memadukan pelatihan dan digitalisasi adalah Program Kartu Prakerja. Program ini diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2020 yang bertujuan untuk membantu masyarakat mempersiapkan keterampilan dunia kerja. Awalnya program ini diperuntukkan bagi pencari kerja usia muda (*fresh graduate*). Namun, sejalan dengan meningkatnya penyebaran Covid-19, pemerintah memperluas sasaran penerima menjadi ditambah dengan yang kehilangan pekerjaan saat pagedbluk (Murdaningsih, 2020). Penekanan ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta seluruh kepala dinas ketenagakerjaan mendaftarkan pekerja yang layak mendapat Kartu Prakerja (Murdaningsih, 2020; Shalihah, 2020).

Tercatat 11,4 juta orang telah menjadi penerima Program Kartu Prakerja dari tahun 2020 hingga 2021 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Pada tanggal 15 Mei 2022, Program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang ke-29 (Prakerja, n.d.). Data yang dikumpulkan pengelola situsnya menunjukkan rata-rata kunjungan ke situs Prakerja dalam 2 bulan pertama sejak fitur ini diluncurkan telah menca-

pai 9.900 hingga 85.000 pengguna setiap minggu. Angka tersebut menunjukkan besarnya minat dan motivasi pencari kerja terhadap program pemerintah ini.

Manajemen pelaksana Program Kartu Prakerja (*Project Management Office* disingkat PMO) berkedudukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Semua kebijakan Program Kartu Prakerja dirumuskan oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kepala Staf Kepresidenan sebagai Wakil Ketua. Komite ini terdiri dari 12 (dua belas) menteri dan kepala lembaga sebagai anggota dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretaris Komite. Dalam pelaksanaannya, Program Kartu Prakerja juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah (pemda), antara lain dalam hal: (1) sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; (2) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; (3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan (4) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja. Selain itu, pemda juga dapat memberikan dukungan sistem berbagi biaya pendanaan dan/atau pendampingan kepada penerima manfaat dan usaha kecil menengah.

Program Kartu Prakerja merupakan agenda terpusat yang sepenuhnya menggunakan sistem daring. Ini berarti calon peserta langsung berhubungan dengan sistem yang ada di Kemnaker tanpa harus melalui birokrasi di daerah. Pola ini memungkinkan pelayanan publik yang lebih baik, dekat dengan sasaran, memangkas biaya, dan mengurangi penyelewengan di daerah. Namun sebaliknya, ada tantangan literasi dan akses teknologi yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan sistem daring. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana peran pemda dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Sebelumnya, tulisan Ginting dan Herdiyana (2020) menegaskan perlunya kerja sama dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memantau, membandingkan, hingga mengevaluasi kebijakan Program Kartu Prakerja, dan peran pemda harus lebih dimaksimalkan dalam proses implementasi. Namun, bagaimana pelaksanaan kerja sama dan koordinasi itu belum diulas. Penelitian ini juga berbeda dari beberapa penelitian terdahulu mengenai Program Kartu Prakerja yang lebih banyak dilakukan dengan sudut pandang penerima manfaat (Bachtiar, Bima, Andrina, Warda, & Yusrina, 2020; Predianto & Khoirurrosyidin, 2020; Firnanda, Fitri, & Ardianto, 2021).

Riset dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan corak evaluasi formatif di Provinsi Jawa Barat. Evaluasi formatif dilakukan ketika program berjalan dapat memberikan keuntungan bagi pembuat program karena dapat menemukan kelemahan dan hambatan selama program dilaksanakan. Pemilihan daerah Jawa Barat sebagai fokus penelitian dilandasi banyaknya jumlah industri padat karya di daerah tersebut, yaitu mencapai 55 ribu industri. Berdasarkan data Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, ada lima provinsi dengan jumlah PHK terbesar di awal pandemi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, dan Provinsi Jawa Timur (Pradana, 2020). Selain itu, penerima Kartu Prakerja di Jawa Barat tercatat tertinggi di Indonesia yaitu hampir 1,5 juta orang (Sarasa, 2021).

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung pada tanggal 14–18 Maret 2022. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat, Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 (SBSI 92), dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat untuk mengkonfirmasi data yang didapatkan dari kedua dinas di atas. Wawancara yang dilakukan dibatasi dengan panduan yang berisi pertanyaan mengenai “Bagaimana gambaran implementasi Program Kartu Prakerja di

Jawa Barat?” Untuk melengkapi ditambahkan juga informasi dari media massa dan laporan terkait. Data yang diperoleh dikelompokkan untuk dianalisis dengan teknik analisis naratif, yang menganalisis data menggunakan berbagai sumber dan berfokus pada pengalaman masing-masing sumber data.

Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan gabungan antara bantuan dana dan subsidi pelatihan oleh pemerintah (Adjie & Rachman, 2020). Skema Kartu Prakerja sejatinya merupakan sistem yang memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan mengikuti Program Kartu Prakerja, para pengangguran dan pencari kerja diharapkan memiliki bekal untuk memulai kariernya.

Calon penerima Kartu Prakerja harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) warga negara Indonesia; (2) usia minimal 18 tahun; dan (3) sedang tidak mengikuti pendidikan formal (Kemnaker.go.id, 2020). Selain itu, penerima Kartu Prakerja adalah yang belum mendapatkan bantuan sosial pemerintah lainnya. Pemerintah juga mengalokasikan jatah untuk 50.000 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) (Karunia, 2022).

Di tahun 2020, peserta Program Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat sebesar Rp3.550.000 yang terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 dan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Lalu, peserta Program Kartu Prakerja 2020 juga menerima insentif survei kebecerjaan sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali survei atau total Rp150.000 per peserta. Pendaftaran pertama dimulai pada tanggal 11 April 2020 (Shalihah, 2020). Pelatihan diselenggarakan oleh mitra yang ditunjuk pemerintah pusat.

Penghentian Program Kartu Prakerja

Melalui siaran pers pada tanggal 18 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah menunda pelaksanaan Program Kartu Prakerja sampai ada perbaikan yang dilakukan (Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). KPK menemukan empat aspek yang bermasalah dari program tersebut, yaitu proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. KPK mendata ada sekitar 1,7 juta penduduk yang terkena dampak pandemi Covid-19, tetapi hanya 143 ribu di antara mereka yang mendaftar. Proses pendaftaran pun dianggap menghabiskan biaya hingga Rp30,8 miliar karena menggunakan metode identifikasi wajah (*face recognition*) (Aji, 2020). Kemudian, dalam hal penunjukan mitra pelatihan juga dinilai tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang dianggap memenuhi syarat dan sebanyak 89 persen materi pelatihan tersedia secara gratis di internet. Menyoal pelaksanaan program, KPK menemukan banyak peserta Program Kartu Prakerja mengeluhkan insentif yang tak kunjung cair meski telah menyelesaikan pelatihan (Fauzia, 2020). Evaluasi juga disampaikan oleh SMERU (2020) yang merumuskan tiga rekomendasi kebijakan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas saat ini, terutama terkait pentingnya memprioritaskan bantuan kepada tenaga kesehatan.

Merespons masukan di atas, pemerintah kemudian merevisi aturan Program Kartu Prakerja dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Secara resmi Komite Kartu Prakerja menghentikan program pelatihan pada tanggal 1 Juli 2020 setelah menemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya. Pertama, beberapa mitra platform digital Program Kartu Prakerja membuat dan menawarkan produk paket pelatihan (*bundling*) yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital. Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan bahwa setiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan yang ditawarkan dalam paket pelatihan tersebut setelah mereka mendapatkan insentif tunai. Ketiga, sebagai akibat dari dua poin tersebut, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana dan prasarana, serta program pelatihan untuk satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam setiap paket tersebut. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksanaan Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menyatakan paket *bundling* pelatihan dihentikan sementara namun Program Kartu Prakerja masih tetap berjalan (CNN Indonesia, 2020).

Evaluasi Formatif Kartu Prakerja

Evaluasi formatif merupakan proses yang menekankan proses dan untuk memperbaiki objek yang diteliti, dengan cara menilai kualitas pelaksanaan program (Sugiyono, 2017, p. 525). Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari suatu aktivitas dalam bentuk proses sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk yang berupa barang atau jasa. Evaluasi formatif lebih menekankan pada upaya perbaikan objek yang dievaluasi (Sugiyono, 2017, p. 525).

Beberapa dasar dalam evaluasi ini adalah temuan awal, salah satunya yang dirilis J-PAL dan LPEM FEB UI menunjukkan pendaftar yang memenuhi syarat dan menerima Program Kartu Prakerja memiliki probabilitas 8 persen lebih tinggi untuk memiliki pekerjaan atau memiliki usaha dibandingkan dengan non-penerima (63 persen vs. 59 persen kebekerjaan) (Alatas *et al.*, 2021). Penerima Program Kartu Prakerja memiliki probabilitas 172 persen lebih tinggi untuk menggunakan sertifikat pelatihan saat mencari pekerjaan. Selain itu, survei LPSOS (2021) kepada 500 responden di Indonesia dari 20 kota selama periode 16–24 Juni 2021 menemukan bahwa Program Kartu Prakerja adalah program bantuan pemerintah di masa pandemi yang paling banyak diterima responden (24 persen) dan paling bermanfaat (35 persen).

Melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik (2021) ikut menyoroti program ini dan menemukan 87,22 persen peserta menganggap kebijakan ini dapat meningkatkan keterampilan kerja. Selain untuk meningkatkan kemampuan bekerja, bantuan tunai yang diterima juga mampu menopang peserta untuk bertahan ketika belum memiliki pekerjaan. Sebesar 88 persen penggunaan uang saku insentif disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program Kartu Prakerja merupakan program bantuan yang terpusat dan dilakukan menggunakan sistem digital. Cara ini dipilih untuk menghindari hambatan dalam penggelontoran bantuan sosial selama pandemi, di antaranya: (1) keterbatasan anggaran; (2) ketidaktepatan sasaran; (3) tumpang tindih bantuan; (4) sistem penunjang ketetapan yang masih samar; (5) ketidaksiapan pemerintah; dan tidak jarang pula (6) terjadi penyalahgunaan bantuan oleh pemda (Noerkaiser, 2021, p. 87).

Sisi positif dari pengaturan terpusat ini adalah program pemerintah pusat langsung diimplementasikan kepada target sasaran dan tidak mengalami gangguan birokrasi yang

panjang. Pergeseran pelaksanaan pemerintahan secara daring memang dimaksudkan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dekat dengan pelanggan, efektif biaya, dan dengan cara berbeda tetapi lebih baik (Holmes, 2001, dalam Muluk, 2006, p. 100). Bentuk digitalisasi pemerintahan ini menurut Tapscott (1996, dalam Muluk, 2006, p. 103) dapat dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Digitalisasi Pemerintahan

Dari	Menjadi
Kendali pemerintah	Pelayanan klien dan pemberdayaan masyarakat
Fungsi administrasi yang terisolasi	Pelayanan sumber daya yang terintegrasi
Penanganan arsip dan kertas kerja	Pelayanan elektronik
Proses yang memakan waktu	Responsi singkat dan cepat
Kontrol dan persetujuan eksplisit	Kontrol dan persetujuan implisit
Transaksi keuangan manual	Transfer dana secara elektronik
Mekanisme pelaporan yang kaku	Pencarian informasi yang fleksibel
Teknologi informasi yang terpisah-pisah	Solusi jaringan yang terintegrasi
Pemilihan setiap beberapa tahun	Demokrasi partisipasi yang bisa dilakukan setiap saat

Sumber: Muluk (2006, p. 103).

Namun begitu, digitalisasi pada level pemda memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang bersifat *tangibles* berkenaan dengan sarana dan prasarana digitalisasi, termasuk jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan perangkat dan jaringan komputer (Muluk, 2006, p. 101). Permasalahan teknis di lapangan menjadi hambatan calon penerima bantuan Program Kartu Prakerja untuk mendaftar, bahkan mungkin untuk dapat mengikuti pelatihan daring secara optimal.

Program Kartu Prakerja melibatkan anggaran yang sangat besar sehingga menjadi perhatian Komisi IX agar terus dievaluasi dan diawasi, karena berpotensi munculkan *moral hazard*. Hingga saat ini belum ada penelitian yang dapat mengukur hasil dan efektivitas pelatihan yang didapat untuk mampu bangkit dari dampak pandemi (Parlementaria, 2021).

Pembagian Peran Pemerintahan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU Pemda), urusan pemerintahan bidang tenaga kerja bersifat konkuren, yang berarti dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Jika dilihat dari Tabel 2, maka setiap pemerintahan berwenang untuk melaksanakan pelatihan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, ditegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga dan pemda wajib memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Dukungan yang diharapkan dari pemda terdiri atas empat hal, yaitu: (1) sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja; (2) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; (3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan (4) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis Pelatihan pada Program Kartu Prakerja.

Selain bentuk dukungan di atas, pemda dapat memberikan dukungan sistem berbagai biaya pendanaan Program Kartu Prakerja dan/atau pendampingan kepada penerima manfaat program dan usaha kecil menengah (UKM). Pembiayaan dukungan pemda

Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem dan metode pelatihan. 2. Penetapan standar kompetensi. 3. Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, produktivitas, dan kewirausahaan. 4. Pelaksanaan pelatihan untuk kejuruan yang bersifat strategis. 5. Penetapan kualifikasi instruktur, penggerak swadaya masyarakat (PSM), dan tenaga pelatihan. 6. Pengembangan dan peningkatan kompetensi instruktur dan PSM. 7. Penetapan standar akreditasi lembaga pelatihan kerja. 8. Penerbitan izin pemagangan luar negeri. 9. Pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi. 10. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi. 11. Pengembangan sistem, metode, alat, dan teknik peningkatan produktivitas. 12. Penyadaran produktivitas. 13. Konsultasi produktivitas pada perusahaan besar. 14. Pengukuran produktivitas tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi. 2. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. 3. Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah. 4. Pengukuran produktivitas tingkat provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 4. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. 5. Pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota.
Penempatan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antarkerja nasional. 2. Pengantar kerja. 3. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih dari satu provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 2. Penerbitan izin LPTKS lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan antarkerja di kabupaten/kota 2. Penerbitan izin LPTKS dalam satu kabupaten/kota. 3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten/kota.

Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penerbitan izin pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS). 5. Pengembangan bursa kerja dan informasi pasar kerja nasional dan di luar negeri. 6. Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. 7. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) baru, pengesahan RPTKA perubahan seperti jabatan, lokasi, jumlah tenaga kerja asing, dan kewarganegaraan serta RPTKA perpanjangan lebih dari satu provinsi. 8. Penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) baru dan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari satu provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam satu provinsi. 4. Perlindungan TKI di luar negeri (pra- dan purnapenempatan) di daerah provinsi. 5. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu provinsi. 6. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. 	<p>kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purnapenempatan) di kabupaten/kota. 5. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu kabupaten/kota.
Hubungan Industrial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu provinsi. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan yang berakibat/berdampak pada kepentingan nasional/internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu provinsi. 3. Penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota. 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

Bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sistem pengawasan ketenagakerjaan. 2. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. 	

Sumber: UU Pemda (2014).

terhadap Program Kartu Prakerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peran Pemda Jawa Barat dalam Implementasi Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja mendapat banyak respons positif karena dianggap tepat diluncurkan pada saat pandemi ketika terjadi kesulitan mencari pekerjaan dan bertambahnya jumlah pencari kerja akibat PHK. Peran Pemda yang terkait dengan Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Peran Pemda dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Jawa Barat

Dukungan	Disnakertrans Kota Bandung	Disnaker Provinsi Jawa Barat
Sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja	Melakukan sosialisasi bersama BPJS	Media sosial, media massa, maupun media informasi seperti billboard milik Pemda Provinsi Jawa Barat yang tersebar di kabupaten/kota, sosialisasi akan dilakukan via aplikasi Sapa Warga*
Penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah	Dinas tidak menyediakan informasi lembaga pendidikan dan keterampilan (LPK) yang dapat bekerja sama dalam program Kartu Prakerja. Dinas justru mendapatkan informasi dari LPK yang selama ini menjadi mitra	Tidak ada
Penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah	Tidak ada permintaan data kebutuhan	Tidak ada
Fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja	Seluruh proses bersifat daring tidak melibatkan Disnaker Kota Bandung	Memberikan Layanan Asistensi Untuk Kartu Prakerja (LAUK-PK) di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, seluruh BLK dan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (2022); Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (2022); *Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2021); **Pamungkas (2020).

1) Sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilakukan secara normatif oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kota Bandung, yaitu melalui acara sosialisasi langsung, media sosial, media massa, maupun media informasi seperti *billboard* milik Pemda Provinsi Jabar yang tersebar di kabupaten/kota. Sosialisasi juga dilakukan via aplikasi Sapa Warga. Sementara itu, Disnaker Kota Bandung bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan program-program bantuan pemerintah termasuk Program Kartu Prakerja.

2) Penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah

Mitra pelatihan mengajukan penawaran keikutsertaan melalui situs Prakerja. Kemnaker langsung menunjuk LPK daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan prakerja. Pemda tidak dilibatkan dalam proses penunjukan langsung ini. Padahal, banyak dari LPK yang menjadi mitra Program Kartu Prakerja merupakan rekanan kerja dinas dalam melaksanakan pelatihan di daerahnya. Bahkan informasi mengenai keikutsertaan LPK tersebut diperoleh dari rekanan, bukan dikoordinasikan oleh PMO. Dengan begitu, peran pemda untuk melakukan seleksi kualifikasi telah dilucuti secara sistem. Pemda sebenarnya dapat berkontribusi memberikan informasi dan rekomendasi LPK daerahnya yang akan dijadikan mitra sesuai rekam jejaknya. Pemda juga dapat berperan menjadi pengawas kinerja LPK karena berada di wilayah kewenangannya, karena merekalah yang memberikan izin, akreditasi, dan menilai asesor.

3) Penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah

Peran ini tidak diminta kepada pemda. Program Kartu Prakerja yang telah berlangsung tidak menasar penempatan tenaga kerja, hanya sampai peningkatan keterampilan. Di Provinsi Jawa Barat kebutuhan tenaga kerja dari industri dikumpulkan dalam aplikasi *big data* khusus untuk wilayah kerjanya, seperti *New BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Application)* yang dikembangkan Disnaker Kota Bandung. Aplikasi ini memberi kesempatan kepada pemberi kerja di Kota Bandung untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerjanya dan pencari kerja juga bisa melamar secara daring (Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, n.d.). Disnakertrans Provinsi Jawa Barat juga memiliki aplikasi serupa namun tidak terhubung dengan *New BIMMA*, yaitu *Jabarjawara.id* (Tim Redaksi JabarEkspres.com, 2021).

4) Fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja

Sistem daring yang digunakan untuk Program Kartu Prakerja telah menyaring calon penerima manfaat berdasarkan literasi dan akses digitalnya. Mereka yang melek teknologi dan memiliki akses digital memadai dapat mengakses program dengan mudah. Sebaliknya, pencari kerja yang berada di daerah sulit akses akan tersingkir dengan sendirinya.

Disnakertrans Kota Bandung (2022) menegaskan tugas mereka untuk melakukan fasilitasi bantuan pemerintah terhadap tenaga kerja yang ter-PHK dan menganggur baik untuk Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai, maupun bantuan sembako. Disnakertrans Kota Bandung bisa saja membantu pencari kerja yang kesulitan mengakses situs Prakerja dan mengisi formulir. Kenyataannya, buruh di Kota Bandung mengakui tidak ada mekanisme pendaftaran secara luring melalui dinas.

Menariknya, layanan ini justru disediakan oleh Disnaker Provinsi Jawa Barat yang memberikan layanan asistensi untuk Kartu Prakerja yang disingkat LAUK-PK. Kegiatan ini dilaksanakan lima UPTD: Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut. Selain itu, juga diselenggarakan di BLK Disnakertrans di Bandung, yakni BLK Mandiri, BLK PMI (Pekerja Migran Indonesia), serta di BLK Kompetensi. Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak bisa membuat *e-mail*, atau tidak memiliki *handphone* yang memadai sehingga menyulitkan untuk mendaftar Program Kartu Prakerja. Sayangnya, bantuan ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh PMO. Dari wawancara diketahui bahwa Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mengeluhkan tidak adanya tindak lanjut peserta Program Kartu Prakerja yang diusulkan secara luring.

Dukungan Lain

Selain empat peran di atas, pemda juga diharapkan dapat memberikan dukungan (1) sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja dan (2) pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah. Menurut pemda Jawa Barat dan Kota Bandung, program Kartu prakerja sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat secara daring sehingga pemda tidak mengeluhkan adanya kebutuhan untuk berbagi pembiayaan. Meskipun tidak perlu menyisihkan APBD untuk melaksanakan Program Pelatihan Prakerja, pemda memiliki alokasi untuk program pelatihan di daerahnya. Dinas ketenagakerjaan memiliki unit pelaksana teknis daerah (UPTD) untuk melaksanakan pelatihan, seperti BLK dan bekerja sama dengan LPK. Disnakertrans Provinsi Jawa Barat telah memiliki program pelatihan ketenagakerjaan melalui BLK dengan sumber pembiayaan yang berbeda-beda. Pertama, BLK PMI yang diperuntukkan bagi calon pekerja migran dan mereka yang kembali dari bekerja di luar negeri; kedua, BLK Mandiri diselenggarakan untuk kelompok khusus selain PMI dan buruh, misalnya khusus wanita dengan penganggaran bantuan langsung dari luar negeri; dan ketiga, BLK Kompetensi membuka peluang bagi buruh-buruh yang telah bekerja agar dapat meningkatkan kompetensinya, juga bagi mereka yang di-PHK agar mempersiapkan bekal mencari pekerjaan baru. Jika tidak dapat mengakses Program Kartu Prakerja, calon pekerja dapat mengikuti program pelatihan di BLK PMI, BLK Mandiri, ataupun BLK Kompetensi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Disnaker Kota Bandung juga bercita-cita menjadikan BLK-nya sebagai pusat pelatihan,

“Kami juga punya UPTD BLK, tapi bangunannya belum selesai. Dengan begitu, kami bekerja sama dengan LPK yang ada saja. Rencananya BLK Bandung akan dijadikan *center* (kawah candradimuka) untuk pelatihan.” (Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, 2022)

Pendampingan UKM sendiri merupakan program kerja pemda. Gubernur Ridwan Kamil menyatakan ada lima upaya untuk membantu UMKM selama pandemi, yaitu: (1) memudahkan hadirnya bahan baku yang sulit didapat saat pandemi; (2) memudahkan urusan permodalan; (3) melancarkan produksi dan distribusi yang sempat terhambat selama pandemi; (4) menstimulasi untuk menaikkan daya beli; dan (5) membantu menaikkan omset penjualan (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020).

Seperti yang telah disinggung di atas, pemda tidak memiliki akses data siapa saja peserta yang telah menerima Program Kartu Prakerja. Semua calon pekerja dan pengusaha kecil menengah dapat memanfaatkan program pendampingan pemda.

Kendala Pemda dalam Implementasi Program Kartu Prakerja

Beberapa kendala yang dialami Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dalam implementasi Program Kartu Prakerja, antara lain: (1) banyak peserta yang sulit untuk masuk ke dalam akses pendaftaran; (2) sulit untuk mendapatkan informasi tindak lanjut pengaduan; (3) pemda tidak dapat mengakses langsung data jumlah peserta yang telah mendapatkan bantuan dan pelatihan; (4) tidak adanya tindak lanjut peserta Program Kartu Prakerja yang diusulkan secara luring; dan (5) mekanisme pelatihan tidak optimal dikarenakan tidak adanya standar penilaian untuk peserta. Menurut Disnaker Kota Bandung (2022), mereka mendapatkan data berupa evaluasi berapa kali pelatihan per semester, bukan data jumlah calon tenaga kerja yang siap disalurkan sesuai kompetensi yang sudah dipelajarinya.

1) Kesulitan akses

Kesulitan mengakses situs Prakerja juga disampaikan oleh SBSI 92. Selain karena masalah teknis buruknya jaringan di daerah, SBSI 92 juga mengindikasikan banyaknya pekerja yang di-PHK dan berharap mendapatkan bantuan melalui Program Kartu Prakerja. Sementara itu, tidak ada mekanisme pendaftaran secara luring melalui dinas terkait sehingga banyak pekerja yang tidak dapat mengakses program pemerintah tersebut.

Meskipun Disnakertrans Provinsi Jawa Barat telah menyediakan layanan fasilitasi pendaftaran di semua UPTD BLK, proses pendaftaran secara luring tersebut tidak mendapatkan respons yang sesuai. Dengan begitu, peran pemda untuk membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja terbentur. Pemda sudah berusaha melakukan perannya namun tidak ada kerja sama dari PMO.

2) Tindak lanjut pengaduan

Meskipun Program Kartu Prakerja merupakan proyek dari pusat, namun banyak peserta yang mengalami kesulitan terkait program ini mengadukan masalahnya kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kota Bandung. Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri karena pemda tidak memiliki informasi memadai dan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan peserta.

3) Tidak dapat mengakses data langsung

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kota Bandung sepakat bahwa pemda tidak mempunyai akses untuk mengevaluasi Program Kartu Prakerja (tidak dilibatkan dalam sistem pemberian bantuan Kartu Prakerja). Penerima manfaat Kartu Prakerja selama ini langsung berhubungan dengan PMO Kartu Prakerja sehingga daerah terkadang tidak mengetahui pekerja/buruh yang ter-PHK di daerah yang menerima manfaat Program Kartu Prakerja. Pemda juga tidak mendapatkan akses untuk menentukan jenis pelatihan yang cocok diberikan bagi pencari kerja di wilayahnya. Pelatihan yang diberikan telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui situs Prakerja yang tidak bisa diintervensi oleh pemda. Disnaker Kota Bandung menginventarisasi lima pelatihan prakerja yang diberikan, yaitu: (1) pelatihan bahasa; (2) perkantoran; (3) makanan dan minuman; (4) pertanian; dan (5) teknik. Pelatihan tersebut “ditentukan di pusat” sehingga Disnaker Kota Bandung hanya mendapatkan informasi setelah diputuskan oleh Kemnaker.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat menyatakan mekanisme pelatihan langsung dipilih/diakses oleh calon peserta Program Kartu Prakerja dan pelatihan diberikan oleh lembaga pelatihan (*provider*) yang sudah ditentukan/dipilih oleh pemerintah pusat. Ini juga diakui oleh Disnaker Kota Bandung, yang hanya bertugas menyediakan data. Bahkan, pemerintah pusat menjalin kerja sama dengan LPK yang biasa berkolaborasi dengan Disnaker Kota Bandung tanpa berkoordinasi dengan Dinas. Padahal, menurut Disnaker Kota Bandung, “Kami ini adalah dinas yang memberikan pembinaan terhadap LPK yang ada di Kota Bandung: ijin, akreditasi, asesor.”

Hal lain yang ditemukan adalah tidak semua peserta merupakan target sasaran Program Kartu Prakerja, yaitu para pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kenyataannya banyak tenaga kerja yang ter-PHK tidak berhasil mendapatkan bantuan (gagal/tidak terpilih) sedangkan di luar sasaran tersebut banyak yang berhasil mendapatkan bantuan misalnya ibu rumah tangga dan pekerja yang sebenarnya masih bekerja. SBSI 92 (2022) melaporkan, buruh yang ter-PHK sulit mendaftar menjadi peserta Program Kartu Prakerja disebabkan karena kendala teknis. Menurut situs Prakerja sendiri semua

orang dapat mengikuti program ini, tidak hanya pekerja yang menganggur, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi. Pemahaman ini senada dengan pendapat Dinsos Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja dapat diberikan kepada siapa pun yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, meskipun seorang pekerja terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ia belum tentu mendapatkan bantuan (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2022).

Pergeseran sasaran program yang awalnya ditujukan kepada sasaran utama dari program tersebut adalah para *fresh graduate* lulusan SMA/SMK kepada pekerja yang ter-PHK merupakan langkah responsif pemerintah yang perlu dihargai. Pada awalnya pemerintah menysasar pencari kerja baru usia 15–24 tahun yang menyumbang 41,5 persen pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2019 (Luthfi, n.d.). Perbedaan antara pencari kerja *fresh graduate* dengan pencari kerja akibat ter-PHK terletak pada pengalaman. Sebelumnya Program Kartu Prakerja ditujukan untuk mengisi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja *fresh graduate* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Berbeda dengan pekerja ter-PHK, yang mereka butuhkan adalah peningkatan kompetensi, bukan secara drastis mengubah pola keahlian mereka. Oleh karena itu, Program Kartu Prakerja mengusung tujuan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling*. *Skilling* merupakan upaya pemberian keterampilan untuk mencapai standar pasar kerja kepada *fresh graduate*; *reskilling* meliputi pengajaran keterampilan baru; sementara *upskilling* bertujuan meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki.

Perubahan menarik juga bisa dilihat dari pergeseran fokus. Jika sebelumnya untuk pencari kerja diutamakan pelatihan sementara insentif merupakan tambahan (Luthfi, n.d.). Sementara selama masa pandemi, insentif mengemuka karena dibutuhkan bagi pekerja ter-PHK untuk bertahan hidup. Mereka lebih membutuhkan bantuan untuk makan dibandingkan peningkatan keterampilan. SMERU telah melakukan survei untuk mengetahui kebermanfaatan Program Kartu Prakerja bagi penerima manfaat yang mengidentifikasi ada peserta yang tidak tepat untuk mengikuti pelatihan tetapi sangat membutuhkan bantuan sosial (bansos) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Bachtiar *et al.*, 2020). Mereka sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga berhak mendapatkan bansos tanpa perlu mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.

Pelatihan yang disediakan beragam dan memberikan keleluasaan bagi peserta untuk dapat memilih kariernya baik menjadi pekerja industri maupun mandiri. Pelatihan yang ditetapkan Kemnaker untuk Program Kartu Prakerja antara lain: (1) pelatihan bahasa; (2) perkantoran; (3) makanan dan minuman; (4) pertanian; dan (5) teknik. Di Provinsi Jawa Barat, pelatihan yang diminati antara lain menjadi YouTuber (*content creator*), tukang cukur pria (*barber*), *make-up* artis (MUA), dan salon rumahan (*kapster*) (Lukihardianti, 2021). Dari data ini terlihat bahwa calon pekerja memilih keahlian yang dapat dijalankan secara mandiri. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian dunia usaha yang juga membuat perusahaan belum mampu menjalankan kegiatan secara optimal. Selama pandemi lebih banyak terjadi PHK dibandingkan perekrutan baru. Oleh karena itu, berusaha sendiri menjadi pilihan yang lebih pasti dibandingkan menunggu panggilan kerja.

Disnakertrans Kota Bandung semestinya memiliki data pencari kerja yang di-PHK dan bisa langsung didaftarkan untuk Program Kartu Prakerja agar program ini diperoleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Program Kartu Prakerja saja tidak memadai untuk memberikan pelatihan kepada seluruh calon tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Lemahnya peran pemda dalam penyediaan kebutuhan tenaga kerja menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Kondisi ini disebutkan dalam penelitian Bachtiar *et al.* (2020, p. 7) dari SMERU yang membuktikan ada peserta Program Kartu Prakerja yang tidak tepat untuk mengikuti pelatihan tetapi hanya membutuhkan bansos untuk mem-

nuhi kebutuhan dasarnya. Mereka sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga berhak mendapatkan bansos tanpa perlu mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi.

Agak berbeda dengan pendapat di atas, Disnaker Kota Bandung menganggap Program Kartu Prakerja yang sudah berjalan selama ini sudah tepat sasaran. Pendapat ini perlu digarisbawahi mengingat tidak adanya kewenangan pemda untuk mengetahui ketepatan sasaran penerima bantuan. Disnaker Kota Bandung menyatakan, “Lalu setelah ada pandemi langsung ke masyarakat. Jadi dinas tidak tahu dan tidak bisa mengawasi.”

Kedua pendapat yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan baru apakah memang Program Kartu Prakerja diberikan kepada orang yang tepat. Sayangnya, pemda tidak memiliki data mengenai dampak keikutsertaan dalam Program Kartu Prakerja terhadap kegiatan peserta selanjutnya (apakah mendapatkan pekerjaan atau berusaha secara mandiri).

Menariknya, data masyarakat/pekerja yang butuh bantuan yang dikumpulkan masing-masing instansi menggunakan indikator yang bervariasi. Dinsos Provinsi Jawa Barat memiliki DTKS yang mengumpulkan data masyarakat miskin target bantuan sosial. Data tersebut bersifat *by name by NIK* (berdasarkan nama dan Nomor Induk Kependudukan). Untuk mengumpulkan data tersebut, Dinsos kabupaten/kota memiliki petugas yang berhubungan langsung dengan RT. Data ini dikumpulkan secara terpusat dalam aplikasi data terpadu kesejahteraan sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Dinsos kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) setempat untuk memverifikasi data. Sementara itu, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat merujuk pada aplikasi Siap Kerja Kemnaker yang merupakan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan sebagai alat utama ekosistem digital untuk pelayanan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan terintegrasi, selain juga memiliki Jabarjawara.id. Berbeda dengan provinsi, Disnaker Kota Bandung memiliki *New BIMMA*.

Data Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat yang mengindikasikan perlindungan pekerja selama bekerja hanya berkorelasi dengan administrasi kependudukan untuk memastikan pekerja yang terdaftar sesuai NIK-nya. Data ini tidak tersambung dengan *database* ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat (Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, 2022). Padahal, setiap aplikasi bisa saja merekam identitas penduduk yang sama. Akibatnya, setiap instansi hanya bisa mengandalkan data masing-masing untuk melaksanakan tugasnya. Padahal, dengan adanya kesatuan data, akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi pemberian manfaat program.

Oleh karena itu, upaya merintis program satu data menjadi sangat penting. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan indikator data yang dikumpulkan sehingga dapat dijelaskan dalam berbagai konteks. Data yang sama bisa jadi tidak masuk pada kriteria salah satu program namun cocok untuk program yang lain. Dengan adanya kesamaan data, pelaksana menghemat waktu melakukan pengumpulan data ulang. Idealnya ketika seseorang tidak mendapatkan salah satu program pemerintah ia dapat direkomendasikan ke program pemerintah lain (lintas kementerian) menggunakan data terpusat tersebut.

4) Standar penyelesaian pelatihan

Pelatihan kerja yang menarik minat di Jawa Barat adalah pelatihan konveksi, barista, dan mencukur. Kondisi ini sesuai dengan ide Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang sebenarnya lebih mendukung pencari kerja untuk menjalankan usaha mandiri (Balai Kerja Mandiri Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, 2017).

Setelah peserta menyelesaikan pelatihan prakerja, mereka diminta mengisi kuesioner, baru setelah itu diberikan sertifikat prakerja. Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mengeluh-

kan banyak peserta yang mengakses pelatihan tetapi tidak mengikuti/melihat langsung tetapi tetap mendapatkan sertifikat dan pengajuan/pelatihan dapat diwakilkan orang lain. Hingga saat ini memang tidak ada mekanisme untuk membuktikan kehadiran seseorang dalam pelatihan karena dilaksanakan secara daring. Namun, sertifikat ini bukanlah sertifikasi kompetensi sehingga tidak dapat mengukur sejauh mana kemampuan peserta untuk menyelesaikan tugas.

Permasalahan kualifikasi ini menjadi momok di kalangan pengelola pasar kerja. Masih adanya gap antara kompetensi calon pekerja dengan kebutuhan pasar kerja bertanggung jawab menyebabkan terjadinya pengangguran. Diakui oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat:

“Kesempatan kerja terbatas, di Jawa Barat pencari kerja (pencaker)-nya sampai 300 ribu, yang bisa masuk hanya 130 ribu. Kenapa tidak bisa masuk semua? Kualifikasi jabatan pencaker tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mungkin terlalu tinggi. Peserta pelatihan perlu kita tingkatkan kompetensi. Di BLK Kompetensi, setelah selesai [pelatihan akan] diuji kompetensi di bidang luas (pelatihan dan produktivitas). Tapi hanya bisa menampung 36 peserta.” (Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, 2022)

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat juga menekankan:

“Teman-teman ini harus dididik dan dilatih sehingga bisa masuk ke perusahaan. Diberikan SDM tapi tidak dididik dan dilatih karena keterbatasan kuota pendidikan. Regulasi dari pusat juga harus didorong.”

Selaras dengan upaya di provinsi, Disnaker Kota Bandung juga menjalankan berbagai fungsi *skilling*: “pada saat pandemi, dilakukan pelatihan berbasis kompetensi, wirausaha, serta bursa kerja.” Instansi ini bekerja sama dengan para rektor untuk mendorong lulusan perguruan tinggi melanjutkan pendidikan di luar negeri agar meningkatkan kans mendapatkan pekerjaan lebih baik. Disnaker Kota Bandung bercita-cita memajukan pelatihan kerja di daerahnya karena pelatihan kerja merupakan langkah awal terserapnya calon tenaga kerja.

Oleh karena itu, kehadiran Program Kartu Prakerja selayaknya dihargai sebagai program yang dapat membantu meningkatkan akses pelatihan bagi masyarakat Jawa Barat. Namun, upaya mencocokkan kualifikasi yang dibutuhkan industri dengan pelatihan yang dilakukan masih perlu perbaikan. Celah ini sebenarnya hanya dapat dibuktikan jika pemda memiliki data berapa banyak lulusan Prakerja yang terserap industri atau berhasil berusaha sendiri.

5) Tindak lanjut program

Permasalahan utama dalam Program Kartu Prakerja adalah keterbatasan program ini sampai pada pelatihan saja. Program Kartu Prakerja terbatas sampai pelatihan dan insentif. Hal ini belum memadai untuk mengurangi pengangguran. Pelatihan saja tidak cukup jika calon pekerja ini tidak mendapatkan pekerjaan atau melakukan usaha. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar menambah keterampilan tetapi mendapatkan penghasilan.

Seharusnya peserta yang telah lulus pelatihan Prakerja tetap didampingi sampai mendapatkan pekerjaan baik secara mandiri maupun di industri. Pada poin ini dibutuhkan peran pemda untuk menyalurkan dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri di daerahnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyatukan aplikasi yang digunakan agar saling terkoneksi. Saat ini, pencari kerja yang ingin mengetahui lowongan di Kota Bandung saja dapat mengisi aplikasi *New BIMMA*, namun untuk mendapatkan informasi lebih luas (selain Kota Bandung), ia harus mengisi lagi di aplikasi *Siap Kerja*. Belum lagi dalam hal Program

Prakerja yang tidak terintegrasi dengan aplikasi pasar kerja seperti *New BIMMA* dan *Siap Kerja*. Pada tanggal 9 Maret 2022, PMO Kartu Prakerja akhirnya menambahkan fitur rekomendasi pekerjaan pada layanannya. Fitur ini menghubungkan peserta (baik yang mendapatkan program maupun yang belum lolos seleksi) dengan mitra *Jobs.id*, *Karir.com*, *TopKarir*, dan *Jobstreet*. Integrasi dengan *New BIMMA*, *SIAP Kerja* atau *Jabarjawara.id* dapat meningkatkan peluang kerja pencari kerja.

Baik *Disnakertrans* Provinsi Jawa Barat maupun *Disnaker* Kota Bandung memiliki akses terhadap perusahaan/industri yang membutuhkan tenaga kerja. Pemda juga telah mengembangkan aplikasi bursa kerja yang mempertemukan pencari dan pemberi kerja. Untuk meningkatkan pemanfaatannya, Pemda perlu melakukan sosialisasi dan mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan lowongannya.

Dampak Minimnya Peran Pemda dalam Implementasi Program Kartu Prakerja

Kurangnya keterlibatan pemda dapat menurunkan rasa kepemilikan terhadap program nasional. Akibatnya, pemda tidak merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk menyelesaikan Program Kartu Prakerja. Ditambah pula mereka mendapatkan tambahan pekerjaan menyelesaikan keluhan di lapangan sementara tidak dibekali kewenangan yang memadai. Pihak yang tidak diberikan kesempatan berperan serta dalam suatu program menyebabkan kurang atau bahkan tidak adanya dukungan terhadap program tersebut. Dengan begitu, objek keputusan publik menjadi sulit untuk dilaksanakan (Aminullah, 2004, p. 68).

Wajar jika pemda lebih memilih untuk meningkatkan program pelatihan daerahnya, dibandingkan memberikan kontribusi lebih kepada Program Kartu Prakerja. *Disnakertrans* Kota Bandung menyatakan:

“Kami senang-senang saja karena kaitannya dengan jumlah pelatihan itu membutuhkan waktu. Dalam setahun itu berapa pelatihan. Kota Bandung untuk tahun ini mendapatkan anggaran pelatihan 10 miliar [rupiah], kalau ditambah lagi 5 miliar [rupiah] dari pusat, yakin tidak bisa dilaksanakan karena waktunya tidak cukup. Sebetulnya anggaran kami bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lain, sesuai kebutuhan yang ada di kota Bandung.” (*Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung*, 2022)

Kondisi ini jelas menjadi pengingat agar pemerintah pusat mengevaluasi pembagian peran yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terjadi di lapangan saat ini adalah pemangkasan peran pemda karena buruknya manajemen kolaborasi pemerintah pusat dan pemda. Akibatnya, banyak program-program pusat yang langsung menyasar kepada masyarakat tanpa menghimpun kerja sama pemda. Padahal, pemda adalah yang paling dekat dengan masyarakat (pencari kerja) sehingga lebih memahami kondisi di lapangan. Pemda bertugas menyuplai data yang dibutuhkan untuk program pemerintah pusat, namun tidak mampu melakukan intervensi atas kebijakan yang dikomandoi dari atas. Kondisi ini menempatkan pemda sebagai penonton. Program Kartu Prakerja mengembalikannya ingatan kita pada masa sebelum UU Pemda, yang menurut Prof. Mudrajad Kuncoro (2014, p. 261) sangat kuat sentralisasinya sehingga hampir setiap program bersifat *top-down*. Program yang bersifat *top-down* kadang juga gagal merefleksikan perbedaan kondisi antardaerah.

Permasalahan ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan pemda tidak hanya terjadi di sektor ketenagakerjaan, tetapi juga di urusan pemerintahan konkuren lain. Dalam beberapa tahun ini, muncul tren program pemerintah pusat yang langsung berhubungan dengan penerima tanpa melalui mediasi dan kerja sama dengan pemda. Hal ini menimbulkan sikap tidak kooperatif dari pemda ketika pemerintah pusat menyelenggarakan program yang melibatkan daerah, karena selama ini dianggap pusat dapat menjalankan

programnya sendiri. Melemahnya koordinasi dan sinergisitas ini disebabkan juga adanya tuntutan kepada pemda untuk mengelola daerahnya secara mandiri sesuai dengan UU Pemda. Hal ini menyebabkan pemda dan pemerintah pusat sibuk dengan agenda masing-masing.

Kondisi ini disoroti oleh Ginting & Herdiyana (2020, p. 14) yang melihat peran pemda saat ini belum maksimal, karena selama ini pemerintah pusat kurang mengandalkan sosialisasi dan pemda hanya mengumpulkan data berdasarkan instruksi pemerintah pusat saja. Dukungan pemda atas data daerahnya merupakan salah satu kunci keberhasilan program pusat. Buruknya kolaborasi, integrasi, dan sinergisitas pemerintah pusat dan pemda merupakan hambatan yang perlu ditangani karena berdampak pada inefisiensi program-program di daerah.

Penutup

Peran yang diharapkan dari pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja meliputi sosialisasi, penyediaan data lembaga pelatihan, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah, serta fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja. Dari keempat dukungan tersebut, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat hanya berperan dalam hal sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran peserta serta pemilihan pelatihan. Sementara itu, Disnaker Kota Bandung hanya terlibat dalam hal sosialisasi.

Pada praktiknya, program ini bersifat terpusat dimana seluruh mekanisme dikendalikan oleh pemerintah pusat menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, peran pemda sangat minim, dibatasi pada pengumpulan data, tanpa akses mengambil data, melakukan intervensi data, mengambil keputusan, dan mengevaluasi mekanisme. Bahkan pada tahap pelatihan juga tidak dilibatkan dalam merekomendasikan lembaga pelatihan.

Peran pemda penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Kartu Prakerja. Kolaborasi antara Program Kartu Prakerja dengan pemda menjadi *game changer* upaya pengembalian pekerja ke dunia kerja. Langkah yang perlu disiapkan pemerintah setelah pencari kerja menyelesaikan pelatihan prakerjanya adalah lowongan kerja dan penempatan kerja. Oleh karena itu, pemda jangan hanya membatasi diri dengan sosialisasi dan *job fair*, melainkan menjembatani kemitraan dengan industri agar mereka yang telah mendapatkan peningkatan keterampilan dapat dipekerjakan. Program Kartu Prakerja seyogianya terintegrasi dengan program ketenagakerjaan yang lain melalui satu aplikasi yang dapat diakses pemda. Integrasi Program Kartu Prakerja dengan aplikasi pasar kerja baik milik pemda, milik swasta, maupun milik Kemnaker menjadi penting agar peserta yang sudah lulus dapat disalurkan ke lowongan yang tersedia.

Upaya perbaikan Program Kartu Prakerja perlu terus diawasi oleh Komisi IX DPR RI agar PMO Kartu Prakerja dapat terus meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan manfaat dan daya guna Kartu Prakerja bagi masyarakat. Secara berkala Komisi IX perlu meminta evaluasi efektivitas program ini dalam bentuk data jumlah calon pekerja yang mendapatkan pekerjaan atau memulai UKM setelah mengikuti program. Komisi IX juga perlu mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan dan ruang bagi pemda untuk melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, selain juga mendorong pemda menggeliatkan pasar tenaga kerja di daerahnya untuk menyerap lulusan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengumpulan Data Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI tentang “Perlindungan Tenaga Kerja

Ter-PHK dan Menganggur”: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si., Yulia Indahri, S.Pd., M.A., Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., dan Efendi., S.Sos., M.A.P. yang telah mempernankan hasil pengumpulan data tersebut digunakan dalam tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Adjie, M. F. P., & Rachman, D. F. (2020, Juli 3). Preemployment card program halts course bundles. *The Jakarta Post*. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/02/preemployment-card-program-suspends-course-bundles-amid-irregularities.html>
- Aji, M. R. (2020, Juni 19). Kartu prakerja, KPK: Face recognition hanya untuk BIN dan polisi. Nasional *Tempo.co*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1355532/kartu-prakerja-kpk-face-recognition-hanya-untuk-bin-dan-polisi>
- Alatas, V., Hanna, R., Maulana, A., Olken, B. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2021, Oktober 4). *Evaluasi dampak kartu prakerja: Temuan awal*. J-PAL Asia Tenggara dan LPEM FEB UI. Diakses dari https://public-prakerja.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/www/ebook-reporting/Ringkasan_Eksekutif_Kajian_Evaluasi_Dampak_Kartu_Prakerja_2021_oleh_J-PAL_SEA_Bahasa.pdf
- Aminullah, E. (2004). *Berpikir sistemik: Untuk pembuatan kebijakan publik, bisnis, dan ekonomi*. Penerbit PPM.
- Bachtiar, P. P., Bima, L., Andrina, M., Warda, N., & Yusrina, A. (2020, April 6). Kartu Prakerja di tengah pandemi covid-19: Asesmen cepat dari sudut pandang peserta program. *Catatan Penelitian Smeru No. 3/2020*. SMERU. <https://smeru.or.id/en/file/2843/download?token=HoH6Q1u4>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Karakteristik penerima Program Kartu Prakerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://public-prakerja.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/www/ebook-reporting/laporan-bps-agustus-2021.pdf>
- Balai Kerja Mandiri Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. (2017, Maret 29). *Kerja mandiri jadi pilihan*. Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat. Diakses dari <http://balatrans.disnakertrans.jabarprov.go.id/index.php/web/berita/detail/166/kerja-mandiri-jadi-pilihan>
- Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020, Juni 18). *KPK minta Pemerintah tunda Program Kartu Prakerja*. KPK.go.id. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1700-kpk-minta-pemerintah-tunda-program-kartu-prakerja>
- Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan. (2020, Juni 12). *Setiap Jumat, Menaker Ida bantu pekerja terPHK dengan program padat karya*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/setiap-jumat-menaker-ida-bantu-pekerja-terphk-dengan-program-padat-karya>
- CNN Indonesia. (2020, Juli 20). Pelatihan kartu prakerja dihentikan, bukan programnya. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200702125648-532-520002/pelatihan-kartu-prakerja-dihentikan-bukan-programnya>
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. (2022, Maret 14). Jawaban tertulis atas pertanyaan Pengumpulan Data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Jawaban tertulis]. *Pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. tidak diterbitkan.
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. (n.d.). *Selayang pandang*. Disnaker Kota Bandung: New BIMMA. Diakses dari <https://disnaker.bandung.go.id/>

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (2022, Maret 17). Pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Verbatim]. *Pengumpulan data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur*. tidak diterbitkan.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (2022, Maret 16). Jawaban pertanyaan pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Jawaban Tertulis]. *Pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. tidak diterbitkan.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (n.d.). *Tugas pokok dan fungsi*. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Diakses dari <http://disnakertrans.jabarprov.go.id/tupoksi>
- Fauzia, M. (2020, Juni 19). Insentif belum cair, kartu prakerja masih dalam proses evaluasi. *Kompas.com*. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/19/114000226/insentif-belum-cair-kartu-prakerja-masih-dalam-proses-evaluasi>
- Firnanda, A., Fitri, C., & Ardianto, F. (2021). Evaluasi Program Kartu Prakerja ditinjau dari asas kemanfaatan dan aksesibilitas. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 170–180. Diakses dari <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/download/5243/pdf>
- Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analis Kebijakan*, 4(2), 1–15. Diakses dari <http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/download/431/71>
- Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. (2022, Maret 15). Wawancara Pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Verbatim]. *Pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur*. tidak diterbitkan.
- Karunia, A. M. (2022, Februari 17). Syarat dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang ke-23 tahun ini. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/17/165619481/syarat-dan-cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-ke-23-tahun-ini?page=all>
- Kementerian Ketenagakerjaan. (n.d.). *Apa sih Kartu Prakerja itu?* Kemnaker.go.id. Diakses dari <https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja/about?acceptPreWorkCard=1>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, November 25). *Tentang Kartu Prakerja*. Kartu Prakerja. Diakses dari <https://www.prakerja.go.id/tanya-jawab/tentang-kartu-prakerja>
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi daerah: Menuju era baru pembangunan daerah*. Penerbit Erlangga.
- LPSOS. (2021, Juni). *SEA AHEAD: Evolving opinions and behavior in Southeast Asia through the COVID-19 pandemic findings from a study conducted June 2021* [Papararan]. Prakerja. Diakses dari <https://static-asset-cdn.prakerja.go.id/www/ebook-reporting/Laporan-Survei-Ipsos-Juni-2021-terkait-Bantuan-Pemerintah-selama-pandemi-Covid-19.pdf>
- Lukihardianti, A. (2021, April 13). Ini pelatihan yang diminati peserta Kartu Prakerja di Jabar. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qrhmog428/ini-pelatihan-yang-diminati-peserta-kartu-prakerja-di-jabar>
- Luthfi, N. A. (n.d.). *Program Kartu Prakerja di tengah pandemi*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/program-kartu-prakerja-di-tengah-pandemi>
- Muluk, M. R. K. (2006). *Desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Banyumedia.
- Murdaningsih. (2020, April 1). Persiapkan Kartu Prakerja, Menaker minta data karyawan PHK. *Republika.co.id*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q8455x368/persiapkan-kartu-prakerja-menaker-minta-data-karyawan-phk>
- Noerkaisar, N. (2021, Juni 30). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>

- Pamungkas, W. W. (2020, April 30). Sulit daftar Kartu Prakerja? Disnakertrans Jabar buka layanan asistensi. *Bisnis Jabar*. Diakses dari <https://bandung.bisnis.com/read/20200430/550/1235085/sulit-daftar-kartu-prakerja-disnakertrans-jabar-buka-layanan-asistensi>
- Parlementaria. (2021, Maret 29). Program Kartu Prakerja berpotensi timbulkan 'moral hazard'. *Parlementaria*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32347/t/Program+Kartu+Prakerja+Berpotensi+Timbulkan+%E2%80%98Moral+Hazard%E2%80%99>
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2020, Juli 1). *Inilah lima upaya Jabar dorong UMKM saat pandemi Covid-19*. Pemprov Jabar. Diakses dari <https://jabarprov.go.id/index.php/news/38315/2020/07/01/Inilah-Lima-Upaya-Jabar-Dorong-UMKM-Saat-Pandemi-Covid-19>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2021, April 8). *Jabar akan intens sosialisasi pelatihan dalam kartu prakerja*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses dari <https://jabarprov.go.id/index.php/news/41928/2021/04/08/Jabar-Akan-Intens-Sosialisasi-Pelatihan-dalam-Kartu-Prakerja>
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 135 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung* (2014).
- Pradana, R. S. (2020, Juli 4). Dampak Covid-19, ini 5 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak! *Ekonomi Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200704/12/1261583/dampak-covid-19-ini-5-provinsi-dengan-jumlah-phk-terbanyak>
- Prakerja. (n.d.). *Penerima Gelombang 23 Prakerja diumumkan, Denni Purbasari ajak manfaatkan fitur 'cari pelatihan'*. Prakerja. Diakses dari <https://www.prakerja.go.id/artikel/penerima-gelombang-23-prakerja-diumumkan-denni-purbasari-ajak-manfaatkan-fitur-cari-pelatihan>
- Predianto, T., & Khoirurrosyidin. (2020). Mengkaji upaya pemerintah melalui Program Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan di masa pandemi Covid-19. *Gorontalo Journal of Government and Politics*, 3(2), 115–127. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v3i2.1175>
- Sarasa, A. B. (2021, November 27). Terbanyak di Indonesia, penerima Kartu Prakerja di Jabar hampir 1,5 juta orang. *IDX Channel*. Diakses dari <https://www.idxchannel.com/milenomic/terbanyak-di-indonesia-penerima-kartu-prakerja-di-jabar-hampir-15-juta-orang>
- Septiadi, S. A., Sintaasih, D. K., & Wibawa, I. M. A. (2017). Pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja dengan mediasi komitmen organisasional. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(8), 3103–3132. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/165392-ID-pengaruh-keterlibatan-kerja-terhadap-kin.pdf>
- Serikat Buruh Sejahtera Independen 92. (2022, Maret 17). Wawancara pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Verbatim]. *Pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur*. tidak diterbitkan.
- Shalihah, N. F. (2020, April 9). Karyawan yang terkena PHK, dirumahkan, gaji tidak penuh dapat mendaftar Kartu Prakerja, simak cara daftarnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/194400065/karyawan-yang-terkena-phk-dirumahkan-gaji-tidak-penuh-dapat-mendaftar-kartu?page=all>
- SMERU. (2020, April 6). *Respons SMERU terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja (Perpu No 1 Tahun 2020)*. Diakses dari <https://smeru.or.id/en/node/2091>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kebijakan*. Penerbit Alfabeta.
- Tim Redaksi JabarEkspres.com. (2021, April 1). Mau cari lowongan pekerjaan? Disnakertrans Jabar punya Aplikasi Jabarjawara.id. *Jabar Ekspres*. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2021/04/01/mau-cari-lowongan-pekerjaan-disnakertrans-jabar-punya-aplikasi-jabarjawara-id/>